

ANALISIS VALUE FOR MONEY DENGAN PENDEKATAN EFEKTIVITAS PADA KINERJA KEUANGAN KOTA SEMARANG PADA TAHUN ANGGARAN 2017-2021

Erlinda Nur Aulia^{1*}, Agustina Prativi Nugraheni²

^{1,2} Universitas Tidar

E-mail: ¹⁾ erlindanr22@gmail.com, ²⁾ devi.agustina@untidar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun anggaran 2017-2021 melalui analisis Value for Money. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Deskriptif Kuantitatif. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui situs website PPID Pemerintah Kota Semarang berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan menyebutkan bahwa hasil pengukuran rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Kinerja Keuangan, Pengukuran, Value for Money

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the level of effectiveness of the Semarang City Government's financial performance in the 2017-2021 fiscal year through Value for Money analysis. The research method used in this study is the Quantitative Descriptive Method. The data needed in this study was obtained through the PPID website of the Semarang City Government in the form of a Budget Realization Report and Notes to Financial Statements. Based on the measurements that have been carried out, it is stated that the average measurement results obtained within a period of 5 years from 2017 to 2021 reached the effective criteria with an average achievement of 97.82%, which means that during those 5 years the Semarang City Government has achieved success in carrying out tasks to achieve goals.

Keywords: Effectiveness, Financial Performance, Measurement, Value for Money

1. PENDAHULUAN

Melalui pelaksanaan kebijakan fiskal daerah, setiap daerah diberikan kewenangan untuk secara bebas mengatur dan mengatur keuangannya sendiri ketika memiliki otonomi daerah. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kewenangan pengelolaan keuangan daerah dianggap sebagai komponen kewenangan pengelolaan keuangan negara. Dalam skenario ini, kewenangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh setiap kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara APBD. Selain itu, kewenangan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh kepala

satuan kerja perangkat daerah dalam kapasitasnya sebagai pengguna resmi anggaran dan komoditas daerah (Sabrina & Nugraheni, 2022).

Dalam buku Keuangan Daerah oleh Khusaini (2018) menjelaskan Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah semuanya termasuk dalam kegiatan komprehensif yang dikenal sebagai pengelolaan keuangan daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat menampilkan uraian potensi anggaran daerah guna menutupi belanja daerah. Potensi belanja daerah baik langsung maupun tidak langsung dapat menjadi acuan alokasi anggaran untuk program-program yang akan berlansung di masa mendatang. Pengelolaan keuangan daerah dapat mempengaruhi sejauh mana tercapainya tujuan keuangan suatu daerah, maka pengelolaan keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pengukuran kinerja sistem keuangan daerah yang ekonomis, efisien, dan efektif. Hal tersebut nantinya diharapkan dapat mengurangi belanja APBD serta mengentaskan kemiskinan pada daerah tersebut tentunya.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Bab 1 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hak dan kewajiban ini meliputi segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD. Aturan yang diberlakukan atas keuangan daerah oleh berbagai tingkat pemerintahan di tingkat daerah dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah yang dicakupnya dengan menjadikan pengelolaan sumber daya lebih efisien dan efektif.

Anggaran adalah alat yang dapat digunakan untuk manajemen maupun administrasi. Hal ini dinyatakan dalam satuan moneter dan dapat digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan yang terbuka untuk umum. Pengelolaan anggaran serta pencatatan pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan sebagaimana dimaksud. Kumpulan indikator yang dikenal sebagai "nilai uang" mencakup unit input, output, dan hasil sebagai bagian komponen. Pengukuran dengan metode ini sangat penting dilakukan guna membantu instansi pemerintah meningkatkan kesadaran biaya publik sebagai dasar untuk melaksanakan akuntabilitas itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2021), Berikut ini adalah daftar keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan gagasan "nilai uang" ke sektor publik: (1) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik; (2) peningkatan kualitas pelayanan publik; (3) menurunkan biaya pelayanan publik dengan meminimalkan kerugian yang tidak efisien dan memaksimalkan penggunaan input yang hemat biaya; (4) pengalokasian dana belanja yang lebih sesuai dengan kepentingan umum; dan (5) meningkatkan kesadaran masyarakat akan uang sebagai landasan akuntabilitas publik. Dengan melihat tujuan penelitian yang akan dicapai, maka fokus yang lebih diperhatikan dalam penelitian kali ini yaitu indikator efektivitas guna dapat melihat ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh suatu instansi atau pemerintah.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Kinerja Keuangan

Menurut Ayu (2022) kinerja keuangan merupakan salah satu isu penting yang dikaji oleh organisasi sektor publik, termasuk pemerintah. Sejak penerapan anggaran berbasis kinerja, pemerintah telah ditugaskan untuk menghasilkan kinerja keuangan dengan berfokus pada efektivitas dan efisiensi ekonomi.

Kinerja Keuangan menurut Irham (2012) merupakan pemeriksaan atas kepatuhan entitas terhadap norma praktik keuangannya.

2.2. Pengukuran Kinerja

Menurut Whittaker dalam Moeheriono (2012) pada (Safira & Rozak, 2020), pengukuran kinerja adalah teknik manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengambilan keputusan serta untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objects).

Ada dua kelompok pengukuran kinerja: klasik dan terkini. Secara tradisional, kinerja diukur dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan, berdasarkan sifat akuntabilitas. Pengukuran kinerja modern didasarkan pada aktivitas. Pengukuran kinerja digunakan untuk menganalisis aktivitas dan kinerja aktivitas dan untuk memastikan apakah telah terjadi perbaikan yang berkesinambungan (Hansen & Mowen, 2004).

2.3 Value for Money

Value for Money adalah metrik kinerja untuk sektor publik yang memberikan informasi mengenai apakah anggaran yang dikeluarkan memberikan nilai luar biasa bagi masyarakat. Berikut ini adalah indikator yang relevan:

- 1) Ekonomi memberikan dasar untuk menganalisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat mengurangi konsumsi sumber daya mereka dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros.
- 2) Efisiensi ialah perbandingan pengeluaran dan pemasukan dalam konteks kriteria atau target kinerja yang dikaitkan dengan kriteria kinerja tertentu.
- 3) Efektivitas menggambarkan pencapaian program yang dicapai untuk tujuan yang telah ditentukan.

Value for Money menurut Nordiawan & Hertianti (2010) adalah Sebuah metrik yang menunjukkan jika anggaran (dana) yang dialokasikan menciptakan nilai tertentu bagi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2016), gagasan mendapatkan “*Value for Money*” mengacu pada praktik pengelolaan perusahaan yang merupakan bagian dari sektor publik berdasarkan tiga sumbu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ukuran pembagian biaya (faktor dan efisiensi) dan kualitas layanan merupakan dasar untuk evaluasi dan pengukuran kinerja. Teknik ini sering disebut sebagai ukuran 3E karena hemat biaya, hemat waktu, dan hemat sumber daya (Mahsun, 2013). Sedangkan menurut Ardila & Putri (2015), *Value for Money* merupakan konsep yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi sektor publik. *Value for Money* dapat dilihat tidak hanya dari perspektif finansial, tetapi juga dari perspektif non-finansial untuk mengevaluasi keberhasilan program kerja sektor publik.

2.4 Rasio Efektivitas

Efektivitas organisasi dapat dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mampu mencapai serangkaian tujuan yang telah ditentukan. Perbandingan hasil dan keluaran merupakan dasar untuk menentukan efektivitas. Efektivitas pengelolaan keuangan dapat ditunjukkan dengan membandingkan pendapatan aktual dan anggaran pendapatan. Rasio efektivitas sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo dan Mahpatih (2002:11) (dalam (de Carvalho Soares & Wiagustini, 2018))y, menjelaskan sejauh mana pemerintah daerah merealisasikan proyeksi pendapatan daerah dan mencapai target yang ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi daerah.

Program yang berhasil menurut Renyowijoyo (2013:4) (dalam (Syaâ, 2016)) adalah yang mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, efisiensi diukur dengan membandingkan hasil akhir dengan upaya yang dikeluarkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif kuantitatif adalah teknik yang dimulai dengan pengumpulan data, mengevaluasi data dan menampilkan hasilnya, dan berusaha untuk secara objektif mewakili suatu situasi dengan angka-angka (Arikunto, 2013). Penelitian ini mengambil objek penelitian Pemerintah Kota Semarang melalui pendekatan *Value for Money* dengan focus penelitian pada pengukuran indikator efektivitas pada tahun anggaran 2017-2021. Data yang digunakan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang diperoleh melalui situs website PPID Pemerintah Kota Semarang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, telah dinyatakan bahwa kebebasan menyelenggarakan otonomi daerah diberikan kepada semua daerah di berbagai tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat sekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pemerintah daerah lebih diberi keleluasaan untuk melakukan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah disebut juga dengan kedaulatan daerah. Ini adalah kemungkinan asalkan, tentu saja, bahwa pemerintah daerah menjaga kinerja keuangan yang sehat. Kinerja keuangan dapat diukur dengan menggunakan tingkat penyerapan pengeluaran keuangan terhadap target pengendalian pengeluaran. Kinerja keuangan yang buruk dapat dijadikan sebagai tolak ukur kurang efektif atau tidak efektifnya pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Tingkat input, output, serta outcome atau hasil harus diketahui untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas kinerja keuangan suatu instansi atau pemerintah yang sedang dipelajari dengan menggunakan metode *value-for-money*. Metode ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu pemerintahan atau suatu instansi. Di sisi lain, untuk tujuan penelitian ini, kami hanya akan mengukur indikator efikasi, dan data yang akan diperlukan hanya terdiri dari keluaran dan hasil. Hasil pelaksanaan program atau kegiatan

tertentu diwakili oleh ukuran outputnya. Terlepas dari kenyataan bahwa hasil sering dikaitkan dengan tujuan atau sasaran yang diinginkan, singkatnya, hasil adalah pengaruh yang dimiliki oleh kegiatan atau kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, "efektivitas" mengacu pada hubungan yang ada antara kinerja atau keluaran dari pusat pertanggungjawaban dan tujuan yang ingin dicapai. Semakin besar kontribusi produksi unit terhadap nilai keseluruhan keberhasilan pencapaian tujuan ini, semakin efektif unit tersebut secara keseluruhan.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996, Departemen Dalam Negeri mengklasifikasikan efisiensi daerah keuangan otonom menjadi lima tingkat efisiensi sebagai berikut:

Tabel 1 Kriteria Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Kategori	Rasio Efektivitas
Sangat Efektif	>100%
Efektif	>90-100%
Cukup Efektif	>80-90%
Kurang Efektif	>60-80%
Tidak Efektif	<60%

Berikut merupakan tabel data pengukuran tingkat efektivitas kinerja keuangan Kota Semarang pada tahun anggaran 2017-2021.

Tabel 2 Pengukuran Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%
2017	3.964.574.307.584,00	3.967.691.653.122,00	99,92%
2018	4.234.394.060.362,00	4.340.520.828.002,00	97,55%
2019	4.565.340.827.417,00	4.731.425.495.000,00	96,48%
2020	4.400.500.838.480,00	4.360.490.266.707,00	100,91%
2021	4.822.890.590.122,00	5.155.782.364.563,00	94,27%

Sumber: Data diolah, 2022

Pencapaian tujuan organisasi sektor publik terkait erat dengan tingkat efektivitasnya. Jika tindakan tersebut memiliki dampak yang cukup besar terhadap kapasitas pelayanan publik, maka dapat dikatakan efektif. Keberhasilan atau kegagalan suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan ditunjukkan dengan keefektifannya. Dalam hal ini, efektivitas juga berpengaruh pada jumlah yang dibelanjakan. Jika pemerintah daerah mampu mencapai rasio maksimal 100%, maka dianggap memiliki kemampuan yang efektif untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Semakin tinggi tingkat pencapaiannya, maka kemampuan pemerintah daerah juga semakin tinggi, begitu pula sebaliknya.

Tabel 3 Hasil Analisis Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021

Tahun	Analisis Value for Money (Aspek Efektivitas)	
	%	Kriteria
2017	99,92%	Efektif
2018	97,55%	Efektif
2019	96,48%	Efektif
2020	100,91%	Sangat Efektif
2021	94,27%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan untuk Kota Semarang pada tahun 2017 mencapai kriteria efektif dengan hasil pengukuran sebesar 99,92%. Namun, hasil pengukuran tingkat efektivitas pada tahun 2018 mengalami penurunan dengan hasil yang diperoleh sebesar 97,55% pada kriteria efektif. Hasil selanjutnya untuk tahun 2019 juga mengalami penurunan dengan hasil pengukuran yang diperoleh sebesar 96,48%. Pada tahun 2020, hasil pengukuran tingkat efektivitas kinerja keuangan yang diperoleh mengalami kenaikan hingga mencapai kriteria sangat efektif dengan capaian 100,91%. Perolehan tahun terakhir kembali mengalami penurunan dengan hasil pengukuran efektivitas sebesar 94,27% dengan masih pada kriteria efektif. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh rata-rata tingkat efektivitas kinerja keuangan pada Kota Semarang pada tahun anggaran 2015-2021 sebesar 97,82% yang artinya dalam kurun waktu 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang berhasil mencapai tujuan organisasinya dengan pencapaian kriteria efektif.

Berikut ini adalah contoh bagaimana grafik rasio antara realisasi pendapatan dan anggaran pendapatan Pemerintah Kota Semarang untuk tahun anggaran 2017-2021 dapat dibangun dengan menggunakan tabel yang mengukur tingkat efektivitas.



Sumber: Data diolah, 2022

Gambar 1 Grafik Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2017-2021

5. KESIMPULAN

Berikut ini adalah kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini berdasarkan temuan analisis yang dilakukan terhadap data yang tersedia.

- 1) Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan untuk Kota Semarang pada tahun 2017 hingga 2019 belum mencapai 100% dengan hasil pengukuran untuk tahun 2017 sebesar 99,92%, tahun 2018 sebesar 97,55%, dan tahun 2019 sebesar 96,48%. Dari hasil tersebut diketahui untuk tingkat kinerja keuangan Pemerintah Kota Semarang pada tahun tersebut mencapai kriteria efektif. Hal tersebut menggambarkan kemampuan Pemerintah Kota Semarang efektif dalam mencapai tujuannya walaupun mengalami sedikit penurunan pada 3 tahun tersebut.
- 2) Perolehan tahun 2020 mencapai maksimal setelah mengalami penurunan selama 3 tahun berturut-turut dengan hasil capaian sebesar 100,91%. Artinya, kemampuan daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2020 sangat efektif dalam menjalankan tugasnya hingga mencapai tujuan yang diinginkan.
- 3) Pada tahun 2021, capaian pengukuran kembali mengalami penurunan dengan hasil yang diperoleh sebesar 94,27%. Hal tersebut diartikan pada tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang masih masuk dalam kriteria efektif yang berarti Pemerintah Kota Semarang pada tahun tersebut efektif dalam mencapai tujuannya.
- 4) Tingkat efektivitas rata-rata yang diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2017 hingga 2021 mencapai kriteria efektif dengan capaian rata-rata sebesar 97,82%, yang artinya selama 5 tahun tersebut Pemerintah Kota Semarang telah mencapai keberhasilan kerjanya dalam menjalankan tugas hingga mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, maka saran yang ingin penulis sampaikan khususnya dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang ialah untuk mengoptimalkan peran dan fungsi unit manajemen/organisasi pelaksana serta pendukung program maupun kegiatan melalui koordinasi secara periodik diantara unit-unit tersebut guna lebih memaksimalkan kinerja keuangan dalam tingkat efektivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardila, I., & Putri, A. A. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value For Money Pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 15(1).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Ayu, I. (2022). Implikasi Kinerja Keuangan Terhadap Nilai dan Keuntungan Bisnis. *PERSPEKTIF: Sudut Pandang Lintas Pengetahuan*, 1(1), 381–385.
- de Carvalho Soares, M., & Wiagustini, L. P. (2018). Analisis Efektifitas Anggaran Belanja Pada Direção Nacional De Aproveitamento, Logística E Materiais Di Ministério Do Comércio, Indústria E Ambiente Timor Leste. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Vol, 23(2).
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2004). *Management Accounting* (ed.). New York: Thomson, Jakarta: Salemba Empat.
- Irham, F. (2012). Analisis laporan keuangan. *Bandung: Alfabeta*.
- Khusaini, M. (2018). *Keuangan Daerah*. Universitas Brawijaya Press.

- Mahsun, A. (2013). Pendidikan Islam dalam arus globalisasi: Sebuah kajian deskriptif analitis. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8(2), 259–278.
- Mardiasmo. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2 Jakarta: Salemba Empat*. Hal.
- Sabrina, N., & Nugraheni, A. P. (2022). Analysis Of Original Local Government Revenue (Pad) On The Financial Performance Of Kebumen Regency Before And During The Covid-19 Pandemic. *Journal Of Humanities, Social Sciences And Business (JHSSB)*, 2(1), 171–181.
- Safira, A. D. A., & Rozak, H. H. A. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Pada Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah)*.
- Syaâ, K. (2016). Analisis value for money dalam pengukuran kinerja keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, 2(4).